

## PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN BUDAYA TRI HITA KARANA PADA KINERJA KEUANGAN

I Made Bhaskara Sastra<sup>1</sup>  
Ni Made Adi Erawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: madebhaskara33@gmail.com/ +6281238742520

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan budaya *tri hita karana (THK)* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Budaya *THK* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator nilai-nilai yang terkandung didalamnya yaitu nilai integritas, nilai etos kerja dan nilai kelestarian lingkungan, sedangkan kinerja keuangan LPD dilihat dari profitabilitasnya dengan menggunakan rasio *return on asset (ROA)*. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh LPD yang ada di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan jumlah sampel 34 LPD dengan masing-masing ketua LPD sebagai responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan budaya *THK* berpengaruh positif signifikan secara parsial pada kinerja keuangan LPD, sedangkan prinsip, responsibilitas, independensi dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada kinerja keuangan LPD.

**Kata kunci** : *good corporate governance*, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, *tri hita karana*, kinerja keuangan.

### ABSTRACT

*This study aimed to examine the effect of the application of the principles of good corporate governance: transparency, accountability, responsibility, independency, fairness and culture tri hita karana (THK) on financial performance Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Abiansemal district of Badung regency. THK culture in this study was measured using the indicator values contained therein, namely integrity, work ethic value and the value of environmental sustainability, while financial performance LPD views of profitability by using the ratio of return on assets (ROA). The sample in this research that the entire LPD in Abiansemal district of Badung regency with 34 sample and respective LPD chairman as respondent. Data analysis techniques used in this research is multiple linear regression analysis. Hypothesis testing results demonstrate the principles of transparency, accountability and culture THK partial significant positive effect on financial performance LPD, whereas principles, responsibility, independency and fairness no significant effect partially on financial performance LPD.*

**Keywords:** *good corporate governance, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, tri hita karana, financial performance.*

## PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan non bank yang dibentuk oleh Desa Pakraman dan memiliki fungsi dalam pemberdayaan ekonomi *krama* Desa Pakraman. *Krama* Desa yaitu mereka yang menetap pada Desa Pakraman dan menjadi warga pada Desa tersebut serta mempunyai ikatan adat istiadat dan budaya. Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk membantu *krama* Desa Pakraman dalam pembangunan perekonomian melalui tabungan yang terarah dan pemberian modal efektif. Sistem ijon dan gadai gelap yang sebelumnya sering terjadi di masyarakat diharapkan dapat diatasi dengan adanya LPD. Secara kelembagaan menurut kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali, sampai Juni 2016 telah tercatat jumlah LPD yang ada di Bali sebanyak 1.433 LPD dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.804 orang. Jumlah tersebut telah mengindikasikan bahwa penyebaran LPD yang ada di Bali sangat luas, dapat dilihat dengan membandingkan jumlah LPD dengan jumlah Desa Adat yang ada sebanyak 1.458 Desa Adat, maka di dapat rasio sebesar 98,28 %. Kabupaten Badung merupakan salah satu dari Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Bali dengan luas wilayah 418,52 km<sup>2</sup> terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yang sampai saat ini telah memiliki 122 LPD (Bagian Adm. Perekonomian Setda. Kab. Badung, 2015:3). Dari ke-enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat pembangunan Badung Utara dan daerah dengan jumlah LPD terbanyak ke-dua di Kabupaten Badung, yaitu sebanyak 34

LPD dari 34 Desa Adat yang ada, sehingga rasio penyebaran LPD di Kecamatan Abiansemal yaitu 100%.

Berdasarkan data LPLPD Kabupaten Badung per Desember 2015 jumlah dana masyarakat yang terhimpun dalam LPD Se-Kecamatan Abiansemal diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tabungan dan deposito. Berikut adalah data mengenai perkembangan dana LPD Se-Kecamatan Abiansemal dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Dana LPD Se-Kecamatan Abiansemal dari Tahun 2013-2015**  
**(dalam ribuan rupiah)**

Uraian	Periode		
	Desember 2013	Desember 2014	Desember 2015
Tabungan	216.154.051	255.771.527	303.538.977
Deposito	235.444.665	282.465.206	355.613.252
Kredit	405.708.950	475.574.014	573.068.325

Sumber : LPLPD Kabupaten Badung, 2016

Berdasarkan Tabel 1. diatas, dapat dilihat bahwa jumlah dana yang terhimpun dalam LPD Kecamatan Abiansemal setiap periodenya cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPD setiap periodenya semakin meningkat. Dibuktikan dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya di LPD baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Per Desember 2015 tercatat klasifikasi pinjaman gabungan pada seluruh LPD di Kecamatan Abiansemal yaitu kategori pinjaman lancar sebesar 93,2%, pinjaman kurang lancar 4,85%, pinjaman diragukan 0,89%, dan pinjaman macet 1,05%. Melihat presentase pinjaman macet yang hanya 1,05% mengartikan bahwa dari segi kinerja keuangan LPD Kecamatan Abiansemal dapat dikategorikan baik, karena

angka ini berada jauh dibawah yang ditetapkan Bank Indonesia bahwa kredit macet ialah dibawah 5%. Tetapi walaupun kinerja keuangan LPD Se-Kecamatan Abiansemal secara umum dapat dikatakan baik, nyatanya masih terdapat LPD dengan klasifikasi kesehatan, cukup sehat 3 LPD dan kurang sehat 1 LPD seperti yang termuat dalam Tabel 2. dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Klasifikasi Kesehatan LPD Se-Kecamatan Abiansemal dari Tahun 2013-2015**

Uraian	Periode		
	Desember 2013	Desember 2014	Desember 2015
Klasifikasi Kesehatan :			
- Sehat	30	30	30
- Cukup Sehat	1	2	3
- Kurang Sehat	2	2	1
- Tidak Sehat	1	-	-

*Sumber* : LPLPD Kabupaten Badung, 2016

Peran pengelola LPD sangat menentukan tingkat kesehatan LPD itu sendiri. Pengelolaan LPD yang terpisah dengan *krama* Desa tidak menutup kemungkinan adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak pengelola LPD (*agent*) dan mengabaikan kepentingan *krama* Desa (*principal*) yang sering dikenal dengan konflik keagenan. Menurut Benhart dan Rosenstein (1998) konflik yang timbul karena adanya persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat berdampak buruk bagi citra perusahaan serta kinerja yang dihasilkan perusahaan tersebut. Menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) juga sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan. Menurut Oliver (1995), *corporate governance* muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan. Menerapkan sistem tata kelola yang baik pada organisasi sudah didukung dengan dikeluarkannya Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006. Terdapat unsur penting dalam pedoman tersebut yaitu adanya prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan perusahaan antara lain : transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran. Menerapkan prinsip-prinsip GCG khususnya pada LPD diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengelolaan LPD yang akan mengarah pada kinerja LPD yang lebih baik.

Mewujudkan kinerja LPD yang terus maju dan berkembang tidak hanya dipengaruhi oleh sistem tata kelola yang baik, melainkan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja LPD adalah budaya organisasi (Gunawan, 2009). Setiap LPD yang ada di Bali cenderung memiliki budaya organisasi yang berbeda, hal tersebut dikarenakan setiap LPD berada pada wilayah yang berbeda. Perbedaan budaya dalam suatu organisasi secara signifikan akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Shu-Mei, 2010). Budaya organisasi dalam penelitian ini mengacu pada budaya lokal masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana* (THK). Konsep THK merupakan konsep nilai kultur lokal yang telah tumbuh, berkembang dalam tradisi masyarakat Bali, dan bahkan saat ini telah menjadi landasan falsafah bisnis, filosofi pengembangan pariwisata, pengaturan tata ruang, dan rencana strategik pembangunan daerah (Saputra, 2012). Berdasarkan uraian

yang telah dipaparkan, maka penelitian kali ini akan menguji pengaruh penerapan prinsi-prinsip *good corporate governance* dan budaya *tri hita karana* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi pada LPD Se-Kecamatan Abiansemal).

Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan budaya THK pada kinerja keuangan LPD. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan budaya THK pada kinerja keuangan LPD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya kegunaan teoritis yaitu memberikan bukti empiris bahwa teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, serta mengenai bagaimana prinsip-prinsip GCG, dan budaya THK mempengaruhi kinerja keuangan LPD. Kegunaan praktis yaitu memberikan gambaran dan pemahaman bagi pihak manajemen dalam pengelolaan LPD bahwa dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas serta budaya organisasi berbasis *tri hita karana* akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Menurut Einsenhardt (1989) teori keagenan didefinisikan sebagai adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan tugas kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa teori keagenan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu : (1) *Positive agency research*, yaitu memfokuskan pada identifikasi situasi dimana *agent* dan *principal* mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme

pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku *self serving agent*. (2) *Principal agent research*, yaitu memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan *principal* dan *agent*.

Berkaitan dengan penelitian ini yang bertindak sebagai *principal* yaitu Desa Pakraman yang merupakan pemilik dari LPD. Dari segi pengelolaannya Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai *agent*. Adanya pelimpahan tugas dari *principal* ke *agent* ini, telah menimbulkan adanya hubungan keagenan sehingga memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti asimetri informasi dan konflik kepentingan. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a dalam Kharisma, 2014). Menurut Larcker (2007), *corporate governance* ditujukan pada mekanisme pengelolaan perusahaan terutama bagi manajer yang keputusannya akan dipertimbangkan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. *Corporate governace* semakin dipahami oleh kalangan pembuat kebijakan sebagai nilai untuk meningkatkan strategi bersaing perusahaan (Akinkoye & Olanmi, 2014). Penerapan GCG diharapkan dapat menjamin tercapainya efektivitas pola kinerja yang bersih, transparan dan profesional sehingga dapat mencegah terjadinya

praktik perilaku yang bertentangan dengan prinsip yang dianut perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), mengacu pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi. Akuntabilitas (*Accountability*), mengacu pada kejelasan pertanggungjawaban sesuai struktur perusahaan sehingga akan tercipta pengelolaan perusahaan yang efektif. Responsibilitas (*Responsibility*), mengacu pada tanggungjawab untuk mematuhi peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Independensi (*Independency*), mengacu pada pengelolaan yang profesional dan adanya objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan tanpa ada intervensi dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan. Kewajaran (*Fairness*) yaitu tindakan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak dari para *stakeholders* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan akan mendorong terjadinya tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola yang baik akan memberikan kontribusi untuk daya saing dan reputasi perusahaan, memfasilitasi akses ke pasar modal dan pada akhirnya membantu



mengembangkan pasar keuangan dan memacu pertumbuhan ekonomi (Ombayo, 2011).

Robbins and Judge (2007:511), menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Bintoro (2002) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan pada akhirnya juga dapat berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Perusahaan dengan budaya yang kuat hampir melakukan tugas dengan lebih baik dari pada pesaing mereka. Fakta bahwa organisasi yang memiliki budaya kuat atau lemah dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan startegis (Ng'ang'a & Justus, 2012). Budaya organisasi memiliki lebih banyak pengaruh pada kinerja organisasi dengan mempengaruhi psikologis masing-masing pegawai, kelompok kerja dan bahkan seluruh organisasi (Pirson & Lawrence, 2010).

Konsep *tri hita karana* (THK) merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali meliputi: *parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan manusia dengan sesamanya), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan) yang bersumber dari kitab suci agama Hindu *Bhagawad Gita*. Oleh karena itu, konsep THK yang berkembang di Bali, merupakan konsep budaya yang berakar dari ajaran agama (Riana, 2010 dalam Adiputra, 2014). Konsep harmonisasi hubungan masyarakat Bali pada falsafah *Tri Hita Karana* diyakini mengandung nilai-nilai sebagai berikut (Gunawan, 2009; Gunawan, 2012) yaitu unsur *parahyangan*, unsur ini

mengandung nilai integritas yang terdiri dari bertakwa, penuh dedikasi dan kejujuran. Unsur *pawongan*, unsur ini mengandung nilai etos kerja, yang terdiri dari kreativitas, bekerja keras dalam bekerja, menghargai waktu, bekerja sama secara harmonis, setia kepada janji, bertindak efisien, dan penuh prakarsa. Unsur *palemahan*, prinsip ini mengandung nilai kelestarian lingkungan yang terdiri dari membangun, memelihara, dan mengamankan.

Nainggolan (2004) dalam Wiagustini (2014:42) menyatakan kinerja keuangan menjadi salah satu aspek penelitian yang fundamental mengenai kondisi yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan tingkat profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan LPD. Profitabilitas perusahaan umumnya dianggap sebagai prasyarat penting untuk keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Yazdanfar, 2013). Dalam penelitian ini, profitabilitas LPD akan diukur menggunakan rasio *return on asset* (ROA). Rasio ROA ini dipilih karena ROA menunjukkan indikasi realistis kinerja perusahaan karena menunjukkan efisiensi total aset untuk menghasilkan keuntungan (Chadha & Sharma, 2015). Berkaitan dengan teori agensi hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah seperti konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Timbulnya masalah keagenan ini akan berdampak pada sistem tata kelola perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku pada perusahaan. Solusi yang dapat diberikan untuk meminimalisir masalah keagenan ini yaitu dengan menerapkan praktik *good corporate governance*.

Transparansi adalah salah satu prinsip dari GCG yang saat ini menjadi sorotan publik. Pentingnya menerapkan prinsip transparansi sebagai pedoman

bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan salah satu prinsip GCG yaitu transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Yaghoobnezhad *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa tingkat *corporate governace* merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kualitas laba perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Transparansi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Muh (2009:5) menyatakan akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Hal ini berarti penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan akan mencegah adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Jayanti (2016); Hindistari (2016) mendapati hasil bahwa penerapan salah satu prinsip GCG yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd *et.al* (2008) juga menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Responsibilitas yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi sehat (Muh, 2009:5). Dengan memenuhi tanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi sehat sebagai pedoman pengelolaan perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan citra dan kinerja perusahaan yang akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016) mendapati hasil bahwa penerapan salah satu prinsip GCG yaitu responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Menurut Sami *et al.* (2011) dalam Needles *et al.* (2012) juga menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Responsibilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Independensi yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Muh, 2009:5). Pengelolaan perusahaan yang objektif dan terbebas dari konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan sangat penting untuk diperhatikan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Rahmatika (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penerapan kemandirian (*independensi*) terhadap kinerja.

Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian Frediawan (2008); Ristifani (2009); Hindistari (2016). Hal serupa dalam penelitian Soti & Gupta (2013) menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Independensi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Kewajaran merujuk pada keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muh, 2009:5). Proses pengambilan keputusan berdasarkan asas kewajaran ini akan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam perusahaan yang berujung pada peningkatan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik.

Jayanti (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kewajaran yang merupakan salah satu dari lima prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016). Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H<sub>5</sub>: Kewajaran berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari keberadaan dan peran dari budaya organisasi itu sendiri. Salah satu konsep budaya yang dapat diadopsi pada suatu organisasi yang ada di Bali yaitu *Tri Hita Karana* (THK). THK merupakan

filosofi budaya lokal yang dianut oleh masyarakat Bali mengenai keseimbangan atau keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), antara manusia dengan sesamanya (*pawongan*), serta antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (*palemahan*).

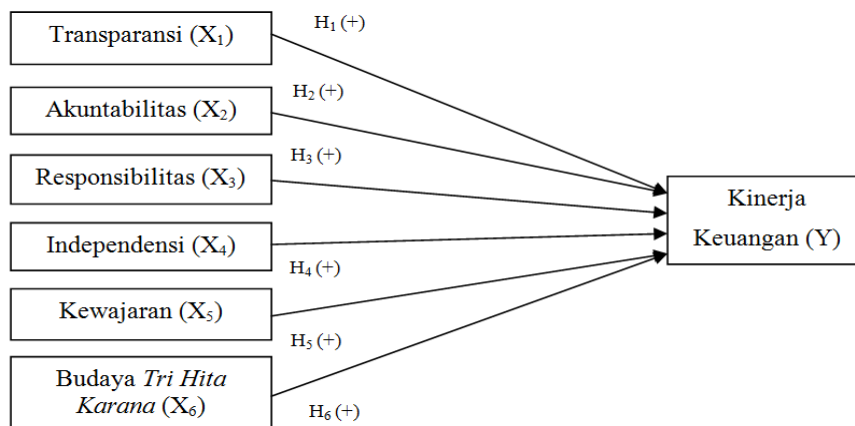
Gunawan (2009) dalam penelitiannya mendapati hasil bahwa, falsafah kultur Bali THK yang diadopsi sebagai budaya organisasi dalam penelitiannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Saputra (2012); Adiputra (2014); Surya (2014) yang mendapati hasil bahwa THK yang diadopsi sebagai budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H<sub>6</sub>: Budaya *Tri Hita Karana* berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer meliputi hasil jawaban responden yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang dibagikan pada setiap responden penelitian dan sumber sekunder meliputi laporan keuangan LPD Se-Kecamatan Abiansemal yang diperoleh dari LPLPD Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan beberapa

variabel yaitu variabel bebas meliputi transparansi ( $X_1$ ), akuntabilitas ( $X_2$ ), tanggung jawab ( $X_3$ ), independensi ( $X_4$ ), kewajaran ( $X_5$ ) dan budaya *tri hita karana* ( $X_6$ ) serta variabel terikat meliputi kinerja keuangan ( $Y$ ). Hubungan antara masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

Sumber : Diolah peneliti, 2016

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *non probability* sampling yang meliputi sampling jenuh, dimana dalam teknik ini semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga didapat jumlah sampel penelitian ini yaitu 34 sampel dengan masing-masing ketua LPD sebagai responden penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni dengan kuesioner, wawancara tidak terstruktur dan observasi *non participant*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression analysis*). Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan LPD
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$  = Koefisien regresi
- $X_1$  = Transparansi
- $X_2$  = Akuntabilitas
- $X_3$  = Responsibilitas
- $X_4$  = Independensi
- $X_5$  = Kewajaran
- $X_6$  = Budaya *Tri Hita Karana*
- $\varepsilon$  = *Error term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 34 sampel yang merupakan seluruh LPD yang ada di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Setiap LPD diberikan masing-masing satu kuesioner yang diisi oleh masing-masing ketua LPD yang merupakan responden penelitian. Dari 34 kuesioner yang dikirim, seluruhnya telah kembali dan bisa digunakan dalam penelitian ini sehingga presentase pengembaliannya 100%. Instrumen dalam penelitian ini mempunyai validitas konstruksi yang baik karena hasil korelasi skor faktor dengan skor total (*pearson correlation*) bernilai positif > 0.3. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.



**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Kode Instrumen	Nilai <i>Pearson Correlations</i>	Keterangan
1	Transparansi (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0,929	Valid
		X <sub>1.2</sub>	0,895	Valid
		X <sub>1.3</sub>	0,933	Valid
2	Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0,948	Valid
		X <sub>2.2</sub>	0,909	Valid
		X <sub>2.3</sub>	0,962	Valid
3	Responsibilitas (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0,898	Valid
		X <sub>3.2</sub>	0,882	Valid
		X <sub>3.3</sub>	0,934	Valid
4	Independensi (X <sub>4</sub> )	X <sub>4.1</sub>	0,951	Valid
		X <sub>4.2</sub>	0,938	Valid
5	Kewajaran (X <sub>5</sub> )	X <sub>5.1</sub>	0,950	Valid
		X <sub>5.2</sub>	0,927	Valid
		X <sub>5.3</sub>	0,952	Valid
6	Budaya Tri Hita Karana (X <sub>6</sub> )	X <sub>6.1</sub>	0,846	Valid
		X <sub>6.2</sub>	0,905	Valid
		X <sub>6.3</sub>	0,937	Valid
		X <sub>6.4</sub>	0,923	Valid
		X <sub>6.5</sub>	0,864	Valid
		X <sub>6.6</sub>	0,892	Valid
		X <sub>6.7</sub>	0,949	Valid
		X <sub>6.8</sub>	0,842	Valid
		X <sub>6.9</sub>	0,917	Valid
		X <sub>6.10</sub>	0,941	Valid
		X <sub>6.11</sub>	0,888	Valid
		X <sub>6.12</sub>	0,928	Valid
		X <sub>6.13</sub>	0,879	Valid

Sumber : Data diolah, 2016

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) > 0,70 (Ghozali, 2013:47-48).

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Transparansi (X <sub>1</sub> )	0,906	Reliabel
2	Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	0,933	Reliabel
3	Responsibilitas (X <sub>3</sub> )	0,892	Reliabel
4	Independensi (X <sub>4</sub> )	0,877	Reliabel
5	Kewajaran (X <sub>5</sub> )	0,937	Reliabel
6	Budaya Tri Hita Karana (X <sub>6</sub> )	0,980	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4. diatas dapat dilihat semua nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) tiap variabel sebesar > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam

penelitian ini memiliki konstruk atau variabel yang reliabel atau handal. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Y	34	0,69	5,16	3,0900	1,28833
X1	34	3,00	12,20	9,4944	2,75714
X2	34	3,00	12,10	9,5109	2,81762
X3	34	4,07	12,46	10,1432	2,71864
X4	34	2,00	8,16	6,6479	1,88957
X5	34	3,00	11,48	9,1282	2,82985
X6	34	17,25	53,35	41,4944	11,71114
Valid N (listwise)	34				

*Sumber* : Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5. diatas, dapat dilihat hasil uji statistik deskriptif menghasilkan nilai-nilai meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dengan jumlah 34 kasus. Misalkan, untuk variabel transparansi ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum sebesar 3,00, nilai maksimum 12,20, rata-rata penerapan variabel 9,4944 dengan penyimpangan nilai variabel terhadap nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi yaitu sebesar 2,75714. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Apabila *Asymp. Sig* (2-tailed)  $> \alpha$  (0,05) maka dikatakan data terdistribusi normal.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		34
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,59386698
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,119
	<i>Positive</i>	0,080
	<i>Negative</i>	-0,119
<i>Test Statistic</i>		0,119
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 <sup>c,d</sup>

*Sumber* : Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6. diatas menunjukkan hasil uji normalitas dengan koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,2 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	X1	0,361	2,774
	X2	0,433	2,312
	X3	0,830	1,205
	X4	0,727	1,376
	X5	0,774	1,293
	X6	0,409	2,444

*Sumber* : Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance*  $\geq 0.10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Hasil uji heteroskedastisitas, nilai Sig. semua variabel independen  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam Tabel 8.

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,651	0,333		1,954	0,061
	X1	0,030	0,036	0,258	0,835	0,411
	X2	-0,034	0,032	-0,300	-1,062	0,297
	X3	-0,009	0,024	-0,075	-0,369	0,715
	X4	0,017	0,037	0,098	0,452	0,655
	X5	-0,018	0,024	-0,158	-0,749	0,460
	X6	0,001	0,008	0,020	0,068	0,946

Sumber : Data diolah, 2016

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda yang termuat pada Tabel 9.

**Tabel 9.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-0,561	0,635		-0,883	0,385
	X1	0,177	0,069	0,378	2,560	0,016
	X2	0,144	0,062	0,315	2,336	0,027
	X3	-0,057	0,046	-0,120	-1,228	0,230
	X4	-0,074	0,071	-0,109	-1,043	0,306
	X5	0,018	0,046	0,040	0,394	0,696
	X6	0,036	0,015	0,329	2,375	0,025
Adjusted R Square		0,740				
F		16,678				
Sig. F		0,000				

Sumber: Data diolah, 2016

Adapun persamaan regresi linier berganda yang dapat dibentuk berdasarkan Tabel 9 yaitu :

$$Y = -0,561 + 0,177 X_1 + 0,144 X_2 - 0,057 X_3 - 0,074 X_4 + 0,018 X_5 + 0,036 X_6$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai konstanta -0,61 menunjukkan jika variabel bebas  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ , dan  $X_6$  diabaikan atau diasumsikan 0 maka nilai kinerja keuangan (Y) adalah -

0,61 artinya tanpa atau sebelum adanya variabel bebas  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ , dan  $X_6$  dalam LPD maka kinerja keuangan LPD akan menurun sebesar 0,61. Nilai koefisien transparansi ( $X_1$ ) sebesar +0,177 dapat diartikan apabila variabel transparansi meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,177. Nilai koefisien akuntabilitas ( $X_2$ ) sebesar +0,144 dapat diartikan apabila variabel akuntabilitas meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,144. Nilai koefisien responsibilitas ( $X_3$ ) sebesar -0,057 dapat diartikan apabila variabel responsibilitas meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,057. Nilai koefisien independensi ( $X_4$ ) sebesar -0,074 dapat diartikan apabila variabel independensi meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,074. Nilai koefisien kewajaran ( $X_5$ ) sebesar +0,018 dapat diartikan apabila variabel kewajaran meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,018. Nilai koefisien budaya *tri hita karana* ( $X_6$ ) sebesar +0,036 dapat diartikan apabila variabel budaya tri hita kirana meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,036.

Berdasarkan Tabel 9 diatas, dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,74, hal ini berarti 74% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran serta budaya *tri hita karana*. Sedangkan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Uji F digunakan untuk menunjukkan semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hasil Uji F pada Tabel 9 menunjukkan nilai F sebesar 16,678 dengan probabilitas 0,000. karena probabilitas  $< 0,05$  maka model regresi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu transparansi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip transparansi seperti menyajikan laporan keuangan secara terbuka, proses pengambilan keputusan yang transparan melalui rapat, dan adanya keterbukaan mengenai informasi maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 9 variabel transparansi memiliki koefisien regresi sebesar +0,177 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi positif dan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila prinsip transparansi dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi pada semakin baik pula kinerja keuangan LPD. Hasil tersebut juga mendukung penelitian yang dilakukan Rahmatika (2015); Frediawan (2008); Ristifani (2009);

Hindistari (2016) yang menyatakan penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip akuntabilitas seperti adanya kejelasan pertanggungjawaban sesuai struktur LPD, pemahaman yang baik mengenai visi, misi, dan tujuan dan target operasional LPD maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD. Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 9 variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar +0,144 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas positif dan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila prinsip akuntabilitas dilakukan dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan LPD. Hasil tersebut juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016); Jayanti (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip tanggung jawab seperti mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian terhadap masyarakat serta kesesuaian terhadap prosedur dan sistem yang ditetapkan maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 9 variabel tanggung jawab memiliki koefisien regresi sebesar -0,057 dengan nilai signifikansi sebesar 0,230 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga rumusan hipotesis H<sub>3</sub> ditolak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena penerapan prinsip tanggung jawab pada LPD yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan dan peraturan LPD yang berlaku masih kurang. Hal ini mungkin terjadi akibat ketidakjelasan dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam pengelolaan LPD yang merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengakui dan melindungi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagai lembaga keuangan bersifat khusus yang diatur hukum adat. Pengakuan LPD sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus dan diatur hukum adat telah menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi berhak mengintervensi atau mengatur urusan teknik maupun operasional pengelolaan LPD sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang LPD yaitu PERDA Prov. Bali No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan daerah provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah sepatutnya diganti dengan perda yang baru ([www.lpdkedonganan.com](http://www.lpdkedonganan.com)). Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan LPD belum bisa dilakukan dengan baik.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Mappaselle (2013); Irwondy (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang



signifikan secara parsial penerapan prinsip responsibilitas terhadap kinerja perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja.

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yaitu independensi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip independensi seperti ketua dan pengelola LPD tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing, serta tidak adanya intervensi dari pihak yang dapat merugikan LPD maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 9 variabel independensi memiliki koefisien regresi sebesar -0,074 dengan nilai signifikansi sebesar 0,306 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independensi negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga rumusan hipotesis  $H_4$  ditolak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dalam proses pengambilan keputusan, ketua LPD belum dapat mengambil keputusan secara objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang dapat merugikan LPD, selain itu ketua LPD juga belum dapat menghindari adanya dominasi oleh pihak lain, mengingat peran LPD yang sangat strategis, maka tidak heran banyak orang ingin ambil bagian dalam pengelolaan LPD tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip independensi dalam pengelolaan LPD belum dapat dilakukan dengan baik.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Mappaselle (2013); Irwondy (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial penerapan prinsip independensi terhadap kinerja perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip independensi berpengaruh positif terhadap kinerja.

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kewajaran berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip kewajaran seperti memperlakukan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD secara adil, tidak memihak, setara dan wajar, baik itu untuk para anggota maupun kepada *krama* desa maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 9 variabel kewajaran memiliki koefisien regresi sebesar +0,018 dengan nilai signifikansi sebesar 0,696 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel kewajaran positif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga rumusan hipotesis  $H_5$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kewajaran pada LPD dapat dikatakan cukup baik. Kewajaran yang dimaksud yaitu memberikan kesempatan yang sama para *krama Desa*/ anggota LPD untuk memberikan masukan dan pendapat pada LPD, memberikan perlakuan adil kepada semua anggota serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan LPD bagi *krama Desa*. Tetapi walaupun penerapan prinsip ini dapat dikatakan cukup baik, nyatanya masih belum dapat mendorong

peningkatan kinerja keuangan LPD, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam proses penerapan prinsip ini secara berkelanjutan, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan LPD. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Irwondy (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial penerapan prinsip kewajaran terhadap kinerja perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016); Jayanti (2016) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja.

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini yaitu budaya *tri hita karana* berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD didasarkan dengan penerapan nilai-nilai budaya *tri hita karana* yang mencakup aspek integritas yaitu bertakwa, penuh dedikasi, dan kejujuran, aspek etos kerja yaitu kreativitas, bekerja keras dalam bekerja, menghargai waktu, bekerja sama secara harmonis, setia kepada janji, bertindak efisien, penuh prakarsa, serta aspek kelestarian lingkungan yaitu membangun, memelihara, dan mengamankan maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 9 variabel budaya *THK* memiliki koefisien regresi sebesar +0,036 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel budaya *THK* positif dan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga  $H_6$  diterima. Hal ini berarti dengan menerapkan

budaya *Tri Hita Karana* sebagai budaya organisasi LPD maka akan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja keuangan LPD. Hasil tersebut juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan (2009); Saputra (2012); Adiputra (2014); Surya (2014) yang mendapati hasil bahwa budaya *tri hita karana* yang diadopsi sebagai budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

### **SIMPILAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan yaitu penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga  $H_1$  diterima. Penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga  $H_2$  diterima. Penerapan prinsip responsibilitas bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD  $H_3$  ditolak. Penerapan prinsip independensi bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga  $H_4$  ditolak. Penerapan prinsip kewajaran bernilai positif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga  $H_5$  ditolak. Penerapan budaya *tri hita karana* berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga  $H_6$  diterima.

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan simpulan yaitu penerapan prinsip GCG serta budaya yang berbasis *tri hita karana* merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya kinerja keuangan LPD yang lebih baik. Oleh karena itu, sebaiknya LPD Se-Kecamatan Abiansemal selalu menjaga dan meningkatkan mutu penerapan prinsip GCG serta budaya organisasi berbasis *tri hita karana* tersebut. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip GCG yang paling

berpengaruh sehingga dapat dikatakan prinsip-prinsip ini lebih dominan diperhatikan oleh LPD Se-Kecamatan Abiansemal, namun baiknya prinsip-prinsip lain seperti responsibilitas, independensi dan kewajaran perlu ditingkatkan penerapannya agar tercipta keseimbangan penerapan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Sosialisasi tentang prinsip-prinsip GCG serta budaya LPD berbasis *tri hita karana* perlu digalakkan secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan, agar mudah dipahami serta diingat sehingga LPD dapat lebih mudah dalam pencapaian tujuannya. Penelitian ini hanya menggunakan sampel LPD Se-Kecamatan Abiansemal yang berjumlah 34 LPD. Hal ini karena keterbatasan waktu dan sumberdaya peneliti sehingga untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang serupa dapat memperluas cakupan LPD dengan kecamatan atau kabupaten yang berbeda untuk menyempurnakan penelitian agar mencakup LPD seluruh Bali sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi secara luas.

## REFERENSI

- Adiputra, I. Made Pradana. 2014. Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Kinerja Internal Auditor (Studi Pada Kantor Inspektorat di Provinsi Bali). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(2), h: 191-206.
- Akinkoye, E. Y., and Olasanmi, O. O. 2014. Corporate governance practice and level of compliance among firms in nigeria: Industry analysis. *Journal of Business and Retail Management Research*, 9(1).
- Bagian Adm. Perekonomian Setda. Kabupaten Badung. 2015. Profil LPD Kabupaten Badung. Mangupura.
- Benhart, S.W., dan Rosenstein S., 1998. "Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis", *Financial Review* 33, pp: 1-16.

- Bintoro, Udan. 2002. Pengaruh Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Budaya Organisasi dan Kinerja Perusahaan. Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 2(2), h: 96-113.
- Chadha, S., and Sharma, A. K. 2015. Capital Structure and Firm Performance: Empirical Evidence From India. *Vision*, 19(4), pp: 295-302.
- Einsenhart, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), pp: 57-74.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Ketut. 2009. Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi (Studi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali). *Jurnal Aplikasi Manajemen*,7(2), h: 441-449.
- Gunawan, Ketut. 2012. Peran Falsafah Tri Hita Karana bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. *Jurnal Analisis Manajemen*,5(2), h: 23-36.
- Hindistari, Renitha Ratu. 2016. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(1), h: 101-128.
- Jayanti Ike Febriani. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Tuban). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(1), h:82-89.
- Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), *Jurnal Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana*, 19(1), h: 9-30.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Kebijakan Good Corporate Governance Indonesia.
- Larcker, David F., Richardson, Scott A., and Irem Tuna. 2007. Corporate Governance, Accounting Outcomes and Organizational Performance. *The Accounting Review*, 82(4), pp: 936-1008.
- Mohd Hassan, C. H., Rashidah, A. R., and Mahenthiran, S. 2008. Corporate Governance, Transparency and Performance of Malaysian Companies. *Managerial Auditing Journal*, 23(8), pp: 744-778..
- Ng'ang'a, Muya James dan Justus Nyongesa. 2012. The Impact of Organizational Culture on Performance of Educational Institutions. *Internal Journal of Business and Social Science*, 3(8), pp:211-217.

- Oliver Hart. 1995. Corporate Governance: Some Theory and Implications. *The Economic Journal*, 105(430), pp: 678-689.
- Ombayo, J.O. 2011. The Effect of Corporate Governance on A Firm's Financial Performance : A Case Study of Companies Listed on The Nairobi Stock Exchange. University of Nairobi. <http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/5924>. Diunduh 25 Agustus 2016.
- Pirson, M.A., dan Lawrence, P.R. 2010. Humanism in business-toward a paradigm shift?. *Journal of business Ethics*, 93, pp:553-565
- Rahmatika, Nurmaria. 2015. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Pura II). *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*, 3(2), h: 148 – 159.
- Ristifani. 2009. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma*.
- Robbins, Stephen P and Judge Timothy A. 2007.*Organizational Behavior*. Twelfth Edition. New Jersey: Pearson Education International.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2012. Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Internal Auditor dengan Kultur Tri Hita Karana sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), h: 86-100.
- Shu-Mei Tseng. 2010. The Correlation Between Organizational Culture and Knowledge Conversion on Corporate Performance. *Journal of Knowledge Management*, 14(2), pp: 269-284.
- Soti, P., and Gupta, S. K. 2013. Impact of Corporate Governance on The Financial Performance of Indian IT Companies Listed on Stock Exchanges. *International Journal of Management Research and Reviews*, 3(3), pp: 2635-2647.
- Yaghoobnezhad, A., Nikoomaram, H., and Salteh, H. M. 2012. The Investigation of The Relationship Between Corporate Governance and Earnings Quality. *African Journal of Business Management*, 6(11), pp: 3898-3912.
- Yazdanfar, D. 2013. Profitability determinants among micro firms: Evidence from swedish data. *International Journal of Managerial Finance*, 9(2), pp: 151-160.